

**DUNIA ISLAM DI AFRIKA TIMUR**  
 (Sebuah Perbandingan Historis “Sosio-Cultural” atas Pluralistisnya Nilai dan  
 Budaya di Indonesia)  
 Oleh : Elan Sumarna

**Abstrak**

Seperinggal Rasulullah Saw dan para sahabatnya pada kurun pertama hijrah secara khusus, dan secara umum setelah jatuhnya kekhilafahan Turki Utsmani dari panggung sejarah, bangsa Eropa mulai bangkit menggantikan posisi kaum muslimin menguasai dunia. Pada saat itu, keadaan kaum muslimin nyaris tertidur pulas dan mundur ke belakang, baik dari sisi politik, ekonomi, Ilmu pengetahuan dll. Carutmarutnya kehidupan politik kaum muslimin dan disertai dengan semakin jauhnya mereka dari petunjuk hidup yang substantif, menyebabkan mereka sulit mencari solusi atas keberagaman realitas kehidupan (agama, dan pemahaman sosio-cultural lainnya), sehingga pada gilirannya mereka relatif gagal menyatukan keberagaman dalam sebuah lembaga politik yang kokoh pasca penjajahan Barat. Hal ini, sebagaimana terlihat di dunia Islam yang ada di Afrika Timur. Dalam kaitan dengan itu, Indonesia boleh dikata menjadi miniatur dari keadaan dunia Islam di Afrika Timur walaupun tidak secara keseluruhan.

Kata kunci : Kerajaan Funj, Majdhubiyah, Samaniyah. al-Murabithun, al-Muwahidun, , Gerakan Mahdi,

**A. Pendahuluan**

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang dunia Islam di Afrika timur, alangkah baiknya kita menggambarkan dahulu tentang benua Afrika secara geografis. Setelah itu kita mencoba melihat bagaimana pengaruh geografis ini terhadap penyebaran Islam di Afrika umumnya dan Afrika Timur khususnya.

**1. Gambaran Umum Benua Afrika**

Luas benua afrika adalah 30.295.000 km<sup>2</sup> atau seperlima dari permukaan daratan bumi. Benua ini tidak banyak memiliki pulau-pulau dan teluk-teluk, sehingga nampak memiliki kesatuan yang utuh.

Dari tanjung Bon di Tunisia (Afrika Utara ) sampai dengan Tanjung Agulhas di Afrika Selatan panjangnya 8000 km<sup>2</sup>, Sedangkan lebarnya dari Cape Verde di Afrika Barat sampai dengan Tanjung Guerdefui di Somalia Timur sejauh 7.400 km.

Adapun batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan laut tengah. Sebelah barat dan tengah berbatasan dengan samudera Atlantik, dan sebelah timur berbatasan dengan samudera Hindia.

Afrika terbagi dua yang hampir-hampir ditengahi oleh garis equator, yaitu hampir 35 ke arah utara dan selatan. Selain itu garis meridian 20 BT membagi

benua Afrika menjadi dua bagian yang sama antara barat dan timur. Keadaan alam Afrika dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu bergunung – gunung, lembah retidak besar, dan dataran pantai sempit. beriklim tropis dan sub tropis.

Penduduk Benua Afrika tahun 1998 berjumlah 763.000.000 jiwa dan sebahagian besar merupakan bangsa Negro. Bangsa Negro di Afrika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Negro Sudan dengan kulit lebih hitam dengan bibir tebal, dan Negro Batu yang kulitnya lebih terang dari Negro Sudan.

Kegiatan ekonomi penduduknya sebahagian besar bersumber dari sektor pertanian, pertambangan dan perindustrian. Sektor pertanian meliputi karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum dan kurma. Dalam sektor pertambangan dan perindustrian, Afrika memiliki barang tambang yang melimpah dengan hasil tambang utama intan ( 98 % ), krom ( 35 % ), mangan (25 % ), dan tembaga (20 % ).

Bedasarkan wilayah administratif, Afrika ini terbagi atas 5 wilayah : Afrika Utara, Afrika barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Benua afrika ini merupakan bekas jajahan Inggris, Perancis dan Spanyol ( E. Maryani : 1997 ).

## 2. Keadaan Sosial – Politik Bangsa Afrika

Penyebaran Islam di Afrika, umumnya tidak terlepas dari latar belakang sejarah penyebaran Islam pada zaman awal kejayaan Islam. Zaman itu dimulai pada masa pemerintahan *Khulafa al-Rasyidin*, terutama di awali pada masa pemerintahan Umar bin Khathab. Pada saat itu peta wilayah kekuasaan Islam di Afrika sudah menyebar sampai ke Mesir.

Ketika Islam sudah masuk Mesir, komunitas kaum muslimin berkembang dimana mereka menikahi para penduduk setempat dan bercampur dengan mereka.

Ada banyak tarikat yang muncul di Afrika, di antaranya *al-Murabithun* dan *al-Muwahiddun* (Ali Mufradi, 1997 :112 ) yang silih berganti menguasai dan menyebarkan Islam di Afrika.

Ketika keberadaan umat Islam di Spanyol runtuh, masyarakat Islam di Afrika sudah mulai terancam pula keberadaannya yang pada gilirannya bangsa Afrika mulai tercabik-cabik oleh penjajah Barat yang kemudian ramai-ramai berdatangan ke benua ini.

Pada abad 19 dunia Islam mulai bangkit dari ketertidurannya, yang walaupun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa, terbangunnya mereka dari tidurnya secara umum karena interaksi mereka sendiri dengan masyarakat Eropa yang saat itu telah melangkah jauh meninggalkan mereka. Tentu saja, ada faktor negatif yang diwariskan sebagai efek samping dari interaksinya itu. Di antara faktor negatifnya, adalah tersebarnya paham nasionalisme yang pada sisi ini mampu menyadarkan mereka dengan kesadaran semu dan mengajarkan paham kebangsaan yang bertumpu pada persamaan ras dan kebudayaan. Kenyataan seperti ini, jelas ikut berkontribusi untuk mengkristalkan kaum muslimin dalam kelompok dan negara.

Disebut dengan kesadaran semu, Karena jika dilihat dari sisi integritasnya kaum muslimin sudah tidak mengakui adanya komunitas yang satu yang berada di bawah naungan pemerintahan yang satu pula. Oleh karena itu, gambaran kaum muslimin sekarang sudah tidak utuh lagi. Mereka tidak lebih dari makanan yang tercabik-cabik yang sedang diperebutkan oleh bangsa Barat yang tengah lapar untuk melahapnya.

Memang dibalik kebangkitan kaum muslimin yang dibarengi dengan disintegrasi sebagai pengaruh dari nasionalisme, tidak lepas dari sisi positifnya, yaitu terintensifikasinya kebangkitan kaum muslimin pada satu aspek.

Bagaimanakah caranya agar sisi positif itu bisa dilanjutkan seraya bisa menepis jurang pemisah yang diakibatkan oleh nasionalisme yang sudah mengakar dikalangan kaum muslimin? Terhadap jawaban ini, sebenarnya sudah jauh-jauh hari Ibnu Taimiyah memberikan jawabannya. Menurutnya, hal ini mudah saja. Ia mengajarkan adanya koordinasi yang baik, yang bersifat Islami di antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat itu. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Qamaruddin Khan ( 1971 : 313 ) dalam bukunya *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, menyatidakan bahwa, ia (Ibnu Taimiyah ) menolak teori kekhilafahan dan mengajukan prinsip kerjasama, baik dalam politik nasional maupun internasional kaum muslimin, sebagai cara yang sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan sejarah.

Dari pendapat Ibnu Taimiyah ini, cukup memberikan masukan pada kita bagaimana membentuk khilafah Islamiyah di alam yang sudah termakan nasionalisme ini.

Negara-negara Afrika Timur yang akan kita bahas kemudian, merupakan salah satu bagian dari problematika umat saat ini.

## **B. Negara-Negara Afrika Timur**

Dalam membahas dunia Islam di wilayah Afrika timur, karena keterbatasan sumber yang dimiliki, maka kita mencukupkan diri pada negara – negara, diantaranya : Sudan, Somalia, dan Ethiopia.

### **1. Sudan**

Sebenarnya dilihat dari sisi wilayahnya, Sudan memiliki wilayah yang luas mencakup bagian timur, tengah dan barat benua Afrika. Namun, negara Sudan modern hanya ada di bagian timur saja. Hal ini bisa difahami karena Islam tersebar bukan dari Afrika utara melainkan dari Mesir, disamping itu karena komunitas Islam Sudan timur telah terbentuk lebih awal (Ira M. Lapidus 1999 : 802)

Migrasi bangsa Arab pertama terjadi pada abad sembilan ketika bangsa Mesir berkerumun di wilayah selatan sampai akhirnya mereka menemukan ladang emas di Allaqi yang terletak di antara Sungai Nil dan Laut Merah. Baru pada abad dua belas dan tiga belas gelombang migrasi Arab Badui meningkat. Mereka

berbaur dengan keluarga lokal melalui suksesi anak-anak mereka yang secara matrilineal mewarisi kepemimpinan lokal.

Di sebelah selatan terdapat masyarakat pengembala yang berasal dari wilayah Blue Nile yang terkenal dengan nama suku Funj yang tengah bergerak ke utara. Kemudian mereka bersama pemimpinnya, Amara Dungas, mampu mengalahkan kerajaan Kristen di Alwa pada tahun 1504 dan menjadikan Sinnar sebagai Ibu kota kerajaan Funj. Dibagian utara negara Funj baru ini berbatasan dengan masyarakat Arab – Muslim, yang kemudian mereka mengadakan hubungan perdagangan dengan bahasa Arab sebagai *Lingua franca*. Perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan ini, pada akhirnya (yakni pada abad 18 ) menjadikan dokumen-dokumen kenegaraanpun menggunakan bahasa Arab.

Kerajaan *Funj* bersandar pada stabilitas perekonomian dalam bentuk perdagangan emas. Semua pertambangan mas yang ada di wilayah kerajaan merupakan milik Sultan, yang juga pengkoordinir perdagangan internasional. Namun, pemonopolian perdagangan ini oleh Sultan akhirnya berakhir saat para pedagang asing yang tinggal di Sinnar semakin besar jumlahnya.

Penyebaran Islam di kerajaan funj di samping meraksuk dikalangan elit penguasa dan komunitas perdagangan, juga karena adanya migrasi ulama dan orang-orang suci muslim ke daerah ini.

Kemajuan kerajaan Funj ini menarik perhatian para Ulama dari Mesir, Afrika Utara dan Arabia, yang secara lokal mereka menyandang predikat keahlian di bidang Alqur`an, hukum Islam, dan Sufi.

Para *faqih* (para ulama itu) memiliki pengaruh yang kuat karena kemampuannya untuk bernegosiasi dan mengkritik penguasa. Mereka mendirikan tempat-tempat pendidikan untuk mengajarkan Alqur`an, hukum dan teologi kepada pemuda semejak dini. Para *faqih* di timur Sudan ini merangkap sebagai anggota tarikat-tarikat sufi. Ada beberapa tarikat yang tersebar di negeri ini, diantaranya tarikat Shahiliyah tersebar di wilayah ini pada abad lima belas, tarikat Qadiriyah pada pertengahan abad enam belas, dan tarikat Majdhubiyah pada abad delapan belas.

Dalam perjalanannya yang panjang, pada abad delapan belas kerajan Funj ini dilanda disintegrasi. Sistem perkawinan dan kepangeranan menjadi dinasti- dinasti otonom. Perdagangan mulai dikuasai oleh para pedagang kelas menengah, dan para faqih medapat mandat dari masyarakat petani, yang semua itu berkontribusi untuk mengerogoti kekuasaan sultan. Kerajaan ini akhirnya tumbang karena penyerbuan bangsa Mesir pada tahun 1820 – 1821, yang kemudian membuka jalan untuk terbukanya / dikenalnya administrasi keIslaman.

Pada akhir abad ke delapan belas Abd al-Rahman al-Rasyid (1786/7 – 1800/1 ) mengkonsolidasikan kesultamam Darfur di sekitar kompleks Istana yang

di namakan al-Fashir. Dengan demikian al-Fashir merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan pelatihan-pelatihan serta perdagangan.

Pada akhir abad delapan belas para pedagang dan tokoh suci muslim mendapat kekuasaan baru dari dinasti Darfur untuk memerintah secara semi independent. Dengan demikian, akhirnya mereka secara partikular berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan lokal mereka.

Islamisasi Sudan bagian timur ini berjalan dengan baik berkat dorongan para faqih sehingga pada abad sembilan belas sultan memasukannya ke dalam kontrol birokrasi.

Kemajuan perdagangan dan kemakmuran Sudan ini akhirnya terusik oleh kedatangan bangsa Portugis, Vasco da Gama, yang menemukan wilayah ini pada tahun 1498, dan dilanjutkan dengan pengerahan pasukan untuk menguasainya.

Pada abad 19 beberapa wilayah yang menyusun negara modern Sudan memiliki sejarah yang panjang sebagai kesultanan muslim. Pada abad 19 dan 20 proses unifikasi territorial dan konsolidasi kekuasaan negara berlangsung secara keras. Proses tersebut dimulai dari ditidakkukannya bangsa Eropa yang saat itu menguasai Sudan oleh Muhammad Ali, yang secara resmi merupakan gubernur Usmani di Mesir, tetapi belakangan menjadi seorang penguasa yang independen yang menaklukan kesultanan Funj pada tahun 1820, dan mendirikan Khartoum sebagai ibu kota baru pada tahun 1830. Kesultanan Darfur-pun dapat dikuasainya pada tahun 1874.

Rezim baru tersebut di bentuk untuk mengelola Sudan agar sesuai dengan prinsip-prinsip modernisasi atau *tanzimat* yang telah diberlakukan Mesir.

Ada beberapa cara yang dilakukan Mesir dalam melaksanakan tujuannya itu :

- a. Dengan menghapuskan monopoli.  
Cara ini dilakukan pada zaman pemerintahan Muhammad Sa`id ( 1854 – 1853 ) sehingga pada masa ini orang-orang Eropa berhamburan ke Sudan untuk mengambil alih perdagangan getah arabic, kulit unta, dan perdagangan gading.
- b. Menundukkan elit keagamaan Muslim. Yaitu dengan menghapuskan hak-hak financial para *faqih* lokal, dan menekan beberapa tarikat Sufi. Sebelumnya pada abad 18 sejumlah perkumpulan modernis, yang terilhami oleh kepulangan mereka dari makkah dan Madinah, telah banyak membuat kemajuan. Tarikat Samaniyah diperkenalkan oleh Sekh Ahmad al-Thayyib Ibnu Basyir yang pulang sekitar tahun 1800. Ajaran pembaharuan Ahmad Ibn Idris al-Frashi (w. 1837 ) diperkenalkan ke Sudan oleh Muhammad al-Majdhub (1796 – 1833).

Tarikat-tarikat itu menghadirkan konsep keagamaan baru, tunduk kepada aturan hukum dan menentang pemujaan tradisional terhadap faqih sebagai penyandang mukzizat dan sebagai orang suci (wali).

Tariqat Samaniyah kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang besar dan bekerjasama dengan rezim Mesir. Samaniyah juga membentuk jaringan kerja yang luas, namun cenderung untuk tidak bekerjasama dengan penguasa. Majdhubiyah melancarkan perlawanan militan, namun sufisme tetap bertahan sebagai basis organisasi lokal dan beroposisi terhadap pemerintah

Dalam setengah abad pemerintahan Mesir di Sudan, benar-benar mampu membangkitkan perlawanan mereka terhadap pejabat-pejabat Turki yang menindas. Ketika Syekh Muhammad Ahmad (1848 – 1885), yakni seorang anggota Samaniyah yang menegaskan dirinya sebagai Mahdi, dan menyerukan pada Islam yang benar. Melalui inspirasinya yang ia katidakan sebagai inspirasi Ilahiyah, ia menyerukan pengajaran dalam berbagai hal, seperti pengasingan kaum wanita dan distribusi tanah, dan berusaha memodifikasi praktek keagamaan Sudan agar sesuai dengan ajaran syari'ah. Iapun menentang penggunaan jimat, penggunaan musik dalam prosesi keagamaan, dan penziarahan ke makam wali. Dalam rangka meneladani hijrah nabi Muhammad saw, ia dan para pengikutnya mengasingkan diri ke bukit Kordofan dan menamakan dirinya sebagai kelompok Anshar (penolong nabi) dan melancarkan Revolusi negara melalui pasukan militer, harta kekayaan, dan administrasi hukum yang terorganisir. Gerakan Mahdi ini, merupakan gerakan terbuka pada tahun 1881 yang berhasil memperbaharui praktek keagamaan Sudan yang masih diliputi praktek pemujaan pada wali-wali, mempercayai jimat-jimat dll.

Gerakan ini mulai memberontak terhadap pemerintah Mesir, dan melanjutkan pergerakannya pada sentralisasi kekuasaan negara. Gerakan inipun berusaha mereformasi praktek Islam agar sesuai dengan standar internasional, menekan oposisi *faqih* lokal dan praktek-praktek lokal pemujaan wali.

Ketika pemimpin kharismatik gerakan ini meninggal yaitu Mahdi Abdullah Ibnu Muhammad, kemudian penggantinya merubah kepemimpinan yang bercorak kharismatik menjadi gerakan revolusioner yang mengarah pada pembentukan negara yang konvensional. Negara ini mengklaim dirinya sebagai negara muslim dan sekaligus menjadi bentuk perlawanan muslim.

Pada tahun 1898 pasukan militer Inggris – Mesir berhasil mengalahkan gerakan Mahdi dalam perang Omdurman. Perang ini mengantarkan terbentuknya *Condominium* (wilayah kekuasaan bersama) Mesir – Inggris (1899 – 1955).

Pada tahun 1924 muncul sebuah gerakan nasionalis sekular. Pada tahun 1930 kelompok nasionalis dan keagamaan benar-benar mulai terorganisir, dan pada tahun 1938 dibentuk Kongres sarjana Umum yang bertujuan untuk memberikan hak bicara pada pejabat-pejabat Sudan dalam pemerintahannya.

Diantara partai-partai yang terbentuk dan berhasil mendapat dukungan massa yang banyak adalah partai – partai keagamaan, diantaranya Partai ummah yang di bentuk oleh Sayyid Abdur Rahman, putra Mahdi dari kelompok Mahdi. Partai inilah yang paling keras menentang penyatuan dengan Mesir. Di pihak lain, partai persatuan nasional akhirnya banyak dikecewakan oleh Nasser dan sangat

mencurigai tujuan-tujuan bangsa Mesir. Dengan demikian pada bulan Januari 1956 Sudan secara resmi menjadi negara merdeka.

Namun, sebagaimana layaknya negara yang baru merdeka tentu saja penataan disana – sini merupakan prioritas utama sekaligus merupakan benturan keras yang tidak terhindarkan. Negara Sudan merdeka ini menghadapi problem besar untuk menegakkan sebuah rezim nasional yang stabil. Problem ini lebih terkonsentrasikan kepada permasalahan yang ada di antara mereka, yaitu di antara mereka yang berkomitmen terhadap konsep Islam sebagai identitas Sudan dan dengan elit militer yang berkomitmen dengan konsep kebangsaan. Dengan demikian, Sudan merdeka menemukan kesulitan dalam menyatukan rezim politik di negerinya. Rezim yang dibentuk pada tahun 1954 segera ditumbangkan melalui kup militer yang dipimpin oleh Jendral Ibrahim Abbud.. Pada tahun 1958 sebuah dewan dari beberapa kekuatan militer mengendalikan kekuasaan pemerintah, menghapuskan sejumlah partai dan serikat dagang. Itulah diantara kemelut yang ada di negara baru ini.

Pada pokoknya, semua itu berpangkal pada dua permasalahan utama, yakni reformasi Islam dan penyatuan wilayah utara – selatan yang umumnya non muslim, di mana hal ini merupakan perkara yang saling berkaitan yang harus segera diselesaikan. Namun, di utara walaupun partai – partai Islam telah dilumpuhkan kapasitasnya, tetapi beberapa kelompok dan program baru bermunculan untuk melancarkan gerakan Islamisasi negara dan masyarakat dalam meningkatkan muatan Islam dalam identitas nasional. Kelompok ini banyak mendapat dukungan dari mahasiswa dan elit terdidik.

Tumbuhnya sentimen Islam di wilayah utara bisa mempertinggi arus integrasi dan islamisasi wilayah selatan. Meskipun demikian, secara lebih pragmatis tokoh-tokoh militer telah menyelesaikan integrasi wilayah selatan dan utara walaupun kenyataan yang pahit yang benar-benar harus ditelan, adalah kesulitan warga selatan yang masih tetap berpikir dalam kapasitas regional dan lokal. (Ira. M. Lapidus 1999 ; 480 )

Setelah kita memaparkan perjalanan sejarah Islam di Sudan sampai dengan sekarang, tampak bahwa kaum muslimin di sana masih terjebak pada simbol-simbol keagamaan yang pada gilirannya selalu terjadi benturan keras dengan mereka yang memiliki simbol lain. Oleh karena itu, wajar jika kestabilan politik di Sudan ini belum bisa di pecahkan. Di samping mungkin karena kultur tiap masyarakat sangatlah berbeda-beda dalam mengaplikasikannya. Namun, lepas dari kenyataan itu semua, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada, maka mengaplikasikan ajaran Islam secara substantif dengan tidak melibatkan simbol-simbol secara sementara, mungkin bisa menjadi penawar atas problematika politik di Sudan ini.

Di Indonesia, apa yang terjadi di Sudan, memang relatif sama masalahnya. Tetapi para pemimpin bangsa ini mampu menstabilkan permasalahan ini dengan membuat suatu falsafah yang relatif bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi lagi-

lagi persoalannya adalah, janganlah falsafah itu dijadikan alat yang abadi apalagi disejajarkan dengan agama. Oleh karena itu, alat pemersatu ini hanyalah sementara saja sipatnya, yang jika nilai-nilai itu sudah teraplikasi maka pada gilirannya simbol-simbol agama itu secara bertahap bisa dinampakkan. Inilah yang sementara waktu ini, penulis sepakat dengan teori alokatif, yaitu sebuah teori yang mendahulukan substansi sedangkan simbol-simbolnya terkemudian.

## 2. Somalia

Masyarakat Somalia seluruhnya adalah masyarakat muslim yang terbagi atas dua kelompok keturunan, yaitu Somali dan Sab yang kemudian terbagi lagi oleh sistem segmen yang kompleks menjadi sejumlah konfederasi, sub konfederasi, suku dan pecahan suku lainnya.

Sejumlah partai politik terbentuk pada tahun 1950-an baik di Somalia yang dikuasai Inggris maupun yang dikuasai Italia yang didasarkan pada unsur klan. *Somaliland national Society* dibentuk berdasar kelompok *Isaq*, sedangkan *United Somali Party* dibentuk berdasarkan kelompok *Dir* dan *Darod*. Namun demikian, perkembangan ragam tulis baru membantu menciptakan sebuah simbol bagi identitas nasional.

Ada tiga tarikat yang berkembang di Somalia, yaitu *Qadiriyyah*, *Ahmadiyah*, dan *Salihiyah*. *Qadiriyyah* diperkenalkan ke Harar sejak awal abad ke- 15. Salah satu cabang tarikat tersebut, yakni *Uway siyah*, merupakan tarikat yang sangat aktif di penjuru wilayah Afrika timur. *Ahmadiyah* didirikan oleh Ahmad bin Idris al-Fasi ( 1760 – 1837 ) dan dibawa ke Somalia oleh Ali Maye Durogha. Tarikat *Sahiliyyah* didirikan oleh Muhammad bin Salih pada tahun 1887, memiliki beberapa permukiman diantara perairan Juba dan Sheballe. Ia merupakan tarikat yang melahirkan Muhammad bin Abdullah, yang sekembalinya dari Makkah mengajarkan purifikasi Islam. Ia mengumumkan perang melawan Kristen dan pemerintahan Inggris, tetapi pada tahun 1908 ia menyepakati sebuah perjanjian temporer yang mengizinkan dirinya menjalankan negara kecil semi otonom di dalam negara Somali. Namun, pada tahun 1920 pihak Inggris mengalahkan pergerakan ini.

Pada umumnya, tarikat- tarikat sufi itu kedudukannya di masyarakat somali, yakni pada masyarakat kesukuannya, berperan sebagai guru dan hakim, menjalankan administrasi hukum muslim dalam urusan perkawinan, properti dan dan perjanjian. Ketika seorang wali-sufi meninggal makamnya sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, objek peziarahan dan disucikan kerana reputasinya dalam memberikan barokah.

Di wilayah selatan, para sufi memainkan peran lebih besar dibandingkan bagian utara. Hal ini terjadi karena di bagian selatan menganut pola hidup *pastoralisme*. Di bagian selatan ini struktur kesukuan lebih lemah dibanding



organisasi negara. Dengan demikian, para sufi memainkan peran lebih besar dalam menumbuhkan keserasian terhadap masyarakat pertanian dan relatif lebih mampu mengamankan posisi politik dalam berhadapan dengan sistem kesukuan.

Pada tahun 1966 jenderal Sayed Barre mengambil alih kekuasaan pemerintahan secara paksa. Ia berusaha menekan afiliasi garis keturunan dan kesukuan, dan menyerukan kerjasama bangsa Somali secara nasionalistik.

Isu yang paling keras bagi Somalia, adalah tuntutan untuk memasukkan masyarakat Somali ke Kenya, Djibouti. Klaim tersebut jelas ditentang oleh negara-negara tetangganya. yang menolak tuntutan yang melanggar batas-batas wilayah.

Dengan penarikan diri pihak Perancis dari Djibouti dan dengan berkobarnya revolusi bangsa Ethiopia, gerilyawan bangsa Somalia di Eretrea, Bale, dan Ogaden berusaha merebut beberapa propinsi tersebut dari kekuasaan bangsa Ethiopia. Dalam peperangan Regional dan internasional yang berlangsung berikutnya, Uni Soviet melepaskan Somalia dan berganti menyokong Ethiopia, dan dengan bantuan Rusia dan Cuba, Ethiopia mampu mengalahkan pasukan Somalia. Namun, di sisi lain perang dengan pasukan Ethiopia ini telah memperkuat penonjolan identitas Islam Somalia yang menonjol hingga berhasil mengalahkan bangsa Etiopia ( Ira Lapidus M, 1999 : 484).

Dari pemaparan di atas tentang negara Somalia ini, jika dibanding dengan negara sebelumnya (Sudan dan nanti Ethiopia), maka kehomogenan dalam keagamaan ini tidak mempengaruhi pada laju unifikasi negara. Ini adalah suatu kelebihan dari Somali. Namun, sayangnya Islam yang dianut oleh mereka lebih bercorak sufistik dan tarikat-tarikat yang tidak bisa menghantarkan mereka pada pemberdayaan umat secara dinamis. Sementara di Sudan, umpamanya, pergerakan keagamaan dapat lebih dimotori oleh oleh tarikat-tarikat yang banyak berinteraksi dengan dunia luar, seperti naik haji ke Mekkah. Namun demikian, sufisme di somalia ini memang memiliki keragaman yang berbeda dalam pendekatannya ke masyarakat.

Adapun perbedaan yang dimaksud terletak pada peranan Sufisme di wilayah utara dan selatan. Dikalangan warga utara, yang umumnya merupakan warga pastoralis (berpola hidup mengembala ternak), para sufi di wilayah ini diterima sebagai klen suku dan mereka diberi sejumlah lahan pertanian. Mereka dimasukkan kedalam garis keturunan suku berpengaruh, yang memandang nenek moyang mereka sebagai wali-wali sufi. Dalam kasus ini perkumpulan sufi pada umumnya terbentuk di perbatasan wilayah kelompok kesukuan dimana mereka dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Sedangkan dibagian selatan negara somali, warganya lebih berpola bercocok tanam dan relatif tidak berpola hidup pastoralis. Struktur kesukuan menjadi lebih lemah sementara organisasi negara menjadi lebih kuat. Di sinilah persoalannya, kenapa para sufi di bagian selatan memiliki peranan yang lebih besar dalam menumbuhkan keserasian terhadap masyarakat pertanian dan relatif lebih

mampu untuk mengakomodir posisi politiknya dalam berhadapan dengan sistem kesukuan.

Dari uraian di atas, dilihat dari sisi pendinamisan dan pemberdayaan terhadap umat, maka para sufi ini tidak mampu mengadakan pembaharuan Islam yang mengarah pada kedinamikaannya.

### 3.Ethiopia

Sebagaimana halnya Somalia, Islam yang datang ke Ethiopia berasal dari daerah pesisir. Pada abad kesembilan warga Arab yang tinggal di wilayah pesisir itu telah tiba di Harar di dataran tinggi Ethiopia dan mendirikan sejumlah kerajaan kecil. Mereka mempropagandakan Islam di kalangan pelayan mereka, mitra dagang mereka, dan di beberapa pasar kampung mereka.

Selanjutnya para pedagang Arab menikahi wanita-wanita Somali, dan menciptakan konsep identitas nasab Muslim – Arab Somali.

Salah satu kesultanan muslim yang pertama adalah kesultanan muslim di Shoa, yaitu suatu konfederasi warga lokal yang mandiri yang dipimpin oleh para pedagang besar, yang pada akhir abad 12 diorganisir oleh keluarga Mahzum.

Sebagaimana halnya dengan Sudan, Ethiopia merupakan contoh negara yang didalamnya terjadi perselisihan tajam antar penduduk muslim, dan non muslim.

Pada fase pertama, persaingan ini dimenangkan oleh pihak Kristen, yang menundukkan kerajaan muslim di Ifat dan wilayah kecil lainnya pada tahun 1415. Sementara beberapa kelompok muslim lainnya mengakui pemerintahan Kristen. Mereka ini adalah anak keturunan penguasa Ifat yang terdahulu membentuk sebuah kerajaan muslim yang bernama Adal yang terletak di sepanjang wilayah pesisir Somali. Kerajaan ini kemudian melanjutkan peperangannya dengan Ethiopia Kristen dan memindahkan ibu kotanya ke Harar pada tahun 1520. Setiap peperangan yang dilancarkan pihak Islam selalu mendapat kemenangan. Hal ini di antaranya karena mendapat bantuan dari kekhilafahan Usmani. Tetapi, pada tahun 1542 terjadi peperangan yang menentukan nasib Kristen – Muslim, namun karena pihak Kristen mendapat bantuan dari Portugis maka pasukan Islam mendapat kekalahan yang besar.

Dari semenjak inilah keberadaan rezim muslim hancur kecuali beberapa daerah dataran rendah di afar, Somalia, dan sebagian wilayah bagian selatan – barat Ethiopia. Namun demikian, selama dua abad ( abad 16 – abad 18 ) mereka tetap mempropagandakan Islam khususnya di kalangan warga Galla, suku Afar dan warga yang berbahasa Tigri yang tinggal di wilayah selatan dan timur Ethiopia.

Pada pertengahan abad tujuh belas, terbentuklah kerajaan baru yang didirikan oleh Ali Bin Daud.

Pada awal abad ke sembilan belas, pengaruh muslim tumbuh kembali, akibat kemajuan perdagangan antara wilayah pegunungan dengan wilayah di laut merah, meningkatnya pelaksanaan haji ke Makkah, dan karena meningkatnya

permintaan budak di Arabia dan beberapa wilayah lainnya. Gondar yang menjadi ibu kota Ethiopia, dibangkitkan kembali oleh pedagang-pedagang Sudan dan Ethiopia sendiri.

Warga Galla di wilayah utara Ethiopia menyebar ke wilayah pegunungan Sidama dan beberapa propinsi di Amhara. Pengaruhnya yang tengah meningkat memberikan tempat berpijak kepada para pedagang muslim dan ulama di daerah ini.

Tokoh-tokoh suci muslim dan tarikat sufi besar perannya dalam penyebaran Islam Tarikat *Qadiriyyah* telah aktif didaerah Harar pada periode yang lebih awal dan menyebar ke Somali dan Eretrea pada abad sembilan belas. Tarikat *Sahiliyyah* tersebar luas di Ogaden setelah tahun 1850. Semua itu berhasil membentuk komunitas-komunitas Muslim yang sebanding jumlahnya dengan komunitas muslim yang terbentuk di Mauritania ( Ira M. L, 1999 : 818)

Selanjutnya, di sini kita kembali lagi kebelakang pembahasan, dimana pertentangan antara muslim dan Kristen merupakan fenomena sejarah dalam perjalanan hidup negeri ini. Dalam hal ini, perselisihan antar kelompok keagamaan telah menimbulkan konflik sejak abad ke 13. Wilayah ekspansi Islam dan kesultanan muslim tengah berkembang pesat mengancam kelangsungan kekuasaan Kristen di Ethiopia. Hal ini berlangsung pada akhir abad ke 18. Tetapi pada tahun 1831 Teodros menduduki tahta Ethiopia dengan tujuan penyatuan kembali orang-orang Kristen, menaklukan Yerusalem, Mekkah dan Madinah, menghancurkan Islam, dan menciptakan kedamaian di negeri ini.

Setelah kematian Menelek ( pengganti Teodros yang meninggal tahun 1867) yakni pada tahun 1913 berlangsung masa yang panjang hingga Haile Selassie menduduki tahta kerajaan pada tahun 1930 dan melancarkan upaya pemusatan negara Ethiopia. Ia berusaha menghapuskan kekuatan bangsawan dengan membentuk kader dari masyarakat biasa yang berpendidikan. Namun usahanya ini tertahan oleh invasi Italia pada tahun 1934 dan 1935, yang memaksa kaisar melarikan diri dan menghantarkan pada pembentukan imperium Afrika Timur – Italia, meliputi wilayah Ethiopia, Eritrea, dan Somalia. Pada tahun 1941 Inggris membantu mengorganisir sebuah perlawanan warga Ethiopia dan mengembalikan Haile Selassie ke tampuk singgasana. Proses sentralisasi dilancarkan kembali semenjak Selasse mengalahkan propinsi lawan, menekan kekuatan gereja, menjadikan kaum pendeta tunduk pada kaisar, dan membebaskan kalangan bangsawan dari posisinya sebagai elit militer dan elit pengumpul pajak.

Seperti halnya negara-negara ketiga lainnya, sentralisasi politik ini menimbulkan perubahan sosial. Selassie menghantarkan berkuasanya pejabat baru yang berasal dari kalangan bangsawan lama. Pada tahun 1950-an kalangan bangsawan pejabat tergeser oleh generasi muda yang tidak tahan terhadap penyelewengan generasi tua. Pada tahun 1975 terjadi pemberontakan kaum radikal yang memaklumkan ideologi Marxisme-Leninisme, nasionalisme, dan reformasi pertahanan. Kehancuran negara tersebut membuka jalan bagi

pertempuran lokal yang menimbulkan kekacauan. Para petani dan pekerja membentuk asosiasi politik sendiri, dan sejumlah komunitas etnis saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan.

Dalam situasi yang kacau seperti ini, minoritas muslim menggunakan perlawanan terhadap upaya penggabungan ke dalam negara Ethiopia. Sejak abad ke 19 komunitas muslim ini mendapat perlakuan yang kurang baik dari penguasa Ethiopia.

Eritrea terpilih menjadi pusat kelanjutan perlawanan muslim. Wilayah perbatasan Eritrea yang semula ditetapkan oleh penguasa Italia dan penduduk muslim lainnya, yang sebahagian besar terdiri dari suku- suku Tigray, baru mengembangkan kesadaran politiknya pada tahun 1940-an. Pada tahun 1952 Eritrea digabungkan dengan Ethiopia berdasarkan otonomi regional. Dan pada tahun 1957 bahasa Arab dan Tigrinya dihapuskan sebagai bahasa resmi. Hal ini menghantarkan pada sebuah Front Pembebasan bangsa Eritrea, yang terdiri dari para mahasiswa, pekerja dan intelektual. Namun pada tahun 1962 gerakan ini berhasil di tindas dan Eritrea secara resmi dicaplok oleh Ethiopia. Sebagai responnya, front pembebasan Eritrea diorganisir kembali oleh tokoh-tokoh yang mengasingkan diri di Cairo dengan dukungan sejumlah tokoh kesukuan dan keagamaan. Namun kelompok ini tidak berideologikan corak keislaman, melainkan hanya sekedar bentuk perlawanan muslim saja. Bahkan kemudian Fron ini menciptakan sebuah koalisi baru dengan Kristen Eritrea yang membenci elit Ethiopia Amharic. Front ini menyerukan sebuah revolusi demokrasi nasional, peperangan rakyat, dan transformasi masyarakat secara revolusioner. Pada tahun 1977 disepakati oleh keduanya adanya tujuan bersama yaitu kemerdekaan, namun pada tahun berikutnya Ethiopia mampu mengalahkan Fron ini dan merebut sejumlah kota di Eritrea. Tetapi walaupun demikian, perlawanan mereka tetap berlanjut, dan di Ethiopia sendiri peperangan warga Kristen yang mendominasi negara dan lawan utamanya (muslim) tetap berlangsung. (Ira, 1999 : 486)

### **C. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimak dan disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Umumnya di beberapa negara yang berpotensi keberagaman agama, maka pada proses unifikasinya yang mengatasmakan paradigma ras dan kebudayaan menjadi permasalahan yang sangat krusial sehingga walaupun unifikasi itu terbentuk, maka kestabilan politik akan tetap sulit dicapai. Hal ini, sebagaimana terjadi di Sudan dan Ethiopia. Di sisi lain, kaum muslimin umumnya senantiasa terjerumus pada simbol-simbol keagamaan yang akhirnya konflik politik sulit untuk di hentikan. Oleh karena itu, perlu adanya alat yang bisa menjembatani dan mengakomodir ajaran Islam dalam bentuk yang lebih substantif sehingga pada gilirannya nilai-nilai Islam bisa dimiliki oleh pluralitas masyarakat. Di Indonesia, hal ini (kestabilan politik )

relatif tercapai di atas keberagaman agama. Tetapi persoalannya jangan sampai alat yang menjembatani ini diabadikan karena sifatnya hanya sementara dan bukan agama. Dengan demikian, mulai hari ini tetap harus dipikirkan suatu metode terbaik, sebagai pengayom dan pelanjut dari apa yang sudah ada, sebagai metode yang paling akomodatif dan paling alokatif dalam menjembatani keberagaman sehingga berakhir pada kesepahaman dan syukur seandainya dapat dicapai kesepakatan.

2. Persoalan lain yang ikut memperkeruh dunia Islam sehingga berkontribusi menjadikan komunitas Islam ini tercabik-cabik, adalah nasionalisme yang muncul dan dihembuskan oleh Barat kepada dunia Islam. Hal ini mengakibatkan kaum muslimin berpikir secara regional dan eksklusif serta mengorek segala perbedaan yang ada yang sifatnya alamiah untuk ditampilkan. Kenyataan ini, teralami betul oleh Ibnu Taimiyah ketika ia menyaksikan bangsa Tartar menghancurkan kekhilafahan Abbasiyah. Ia melihat komunitas muslim ini tercabik-cabik dalam beberapa negara yang yang seolah-olah tidak memiliki kaitan apa-apa di antara mereka. Ia berpendapat, bahwa untuk menyatukan mereka tidak ada jalan lain kecuali mengikat mereka dengan konfederasi dan kordinasi dalam satu tujuan keislaman dengan tidak mengorbankan kedaulatan masing-masing. Pelajaran yang dapat diambil dari uraian ini ternyata bahwa, dengan kondisi dunia Islam pada zamannya dan ternyata kondisi ini terus berlangsung sampai sekarang, menjadikan pendapatnya tentang sistem khilafah yang ia rumuskan dan ia kemas dalam bentuk konfederasi, sangat cocok untuk ditampilkan sekarang
- 3 Dalam kaitannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah di atas, Islam sebagai agama yang universal sebenarnya telah jauh-jauh hari telah menyiapkan sebuah metode yang bisa mengakomodir semua wacana yang berkembang Hal yang dimaksud adalah, bahwa muktamar besar sedunia di *Makkah al-Mukarramah*, yaitu dengan melalui media haji, maka kaum muslimin bisa mengadakan pembaharuan di negaranya masing-masing. Amin.

#### DAFTAR PUSTIDAKA

- Ahmad Silmi, (1978), *al-Tarikh al-Islami Wa al-Hadharat al-Islamiyah*, t.t.,
- Ali Mufradi, (t.th.), *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, t.t : Logos
- Ira M. Lapidus, (t.th), *Sejarah Sosial Ummat Islam I*, Jakarta :Pt Raja Grafindo.

-----, ( 2000 ), *Sejarah Ummat Islam II*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo.

Qamaruddin Khan, (1983), *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, Bandung : Pustaka Salman.